



**UPAYA KESIAPAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI MEA 2015
MELALUI REVITALISASI UMKM****Abu Nur Syihabuddin, Dinar Saefudin** ✉Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2013
Disetujui April 2013
Dipublikasikan Mei 2013

Keywords:
UMKM, pertumbuhan
ekonomi, dan revitalisasi

Abstrak

Persaingan ekonomi nasional dalam menghadapi MEA 2015 dengan negara lain sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian nasional yang mencakup perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tangguh di tengah maraknya pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5 %. Saat ini sekitar 97% pelaku ekonomi mayoritas adalah pelaku usaha UMKM yang terus tumbuh secara signifikan dan menjadi sektor usaha yang mampu menjadi penopang stabilitas perekonomian nasional. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM dapat melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Mengingat UMKM Indonesia adalah usaha yang sangat berdaya saing tinggi. Akan tetapi, kurangnya perhatian pemerintah pada sektor UMKM mengakibatkan pendapatan nasional dari sektor tersebut hanya sebesar 57 %, angka tersebut kalah jauh dari pangsa para konglomerat yang berjumlah kecil tetapi sangat mendominasi perekonomian negara kita. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan program revitalisasi untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan agar UMKM dapat menghasilkan barang / jasa secara maksimal. Dengan melegalkan misalnya, produk UMKM di SNI-kan agar mampu bersaing dengan produk dari Negara lain.

Abstract

National economic competitiveness in the face of AEC 2015 with other countries is determined by the dynamics of the national economy which covers the region's economy, while the economy of the region is generally supported by the economic activity of small and medium business. Business units that fall into the category of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) is the lifeblood of regional and national economy. Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is a tough business in the midst of the national economic growth of 6.5%. Currently around 97% of economic actors majority of SMEs are businesses that continue to grow significantly and become the business sector that is able to support economic stability nasional. Indonesia is a country that has a great potential in the development of SMEs can make breakthroughs to improve the performance of SMEs so as to produce products are highly competitive. Given Indonesian SMEs are businesses that are very highly competitive. However, the lack of government attention to the MSME sector resulted in national income from the sector amounted to only 57%, the figure is far less than its share of the conglomerates that are small but very dominate the economy of our country. Therefore, the government requires a revitalization program to conduct training and empowerment of SMEs in order to produce goods / services to the fullest. By legalizing example, SMEs products in SNI-right in order to compete with products from other countries.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Jumlah UMKM mencapai sekitar 97% dari populasi unit usaha, serta menampung lebih dari 92% jumlah tenaga kerja. Dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5 persen, UMKM menyumbang laju pertumbuhan sekitar 3,0 persen, lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan usaha besar. Dari data awal ini menunjukkan betapa strategisnya pengembangan koperasi dan UMKM. (BPS : 2012)

Sektor UMKM telah terbukti tahan banting dalam menghadapi krisis, bahkan semakin menunjukkan perkembangan pesat. Berdasarkan survei HSBC, dari 51 juta usaha UMKM yang terdaftar, 37 persen di antaranya akan melakukan ekspansi usaha, 16 persen akan menambah jumlah karyawannya. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki efek *multiplier* yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Kurang-lebih 60 persen dari PDB saat ini berkaitan dengan sektor UMKM.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tangguh di tengah krisis ekonomi. Saat ini sekitar 97% pelaku ekonomi mayoritas adalah pelaku usaha UMKM yang terus tumbuh secara signifikan dan menjadi sektor usaha yang mampu menjadi penopang stabilitas perekonomian nasional. UMKM makin tahan banting dan tetap optimistis di tengah krisis. Ketika terjadi krisis global pelaku UMKM tetap bergerak. Pemerintah telah memberikan upaya-upaya pemberdayaan berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk semakin menguat-

kan sektor UMKM ini. Namun upaya pemberdayaan tersebut belum memberikan hasil yang maksimal dan membawa daya ungkit (*leverage*) yang kuat bagi para pelaku UMKM pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

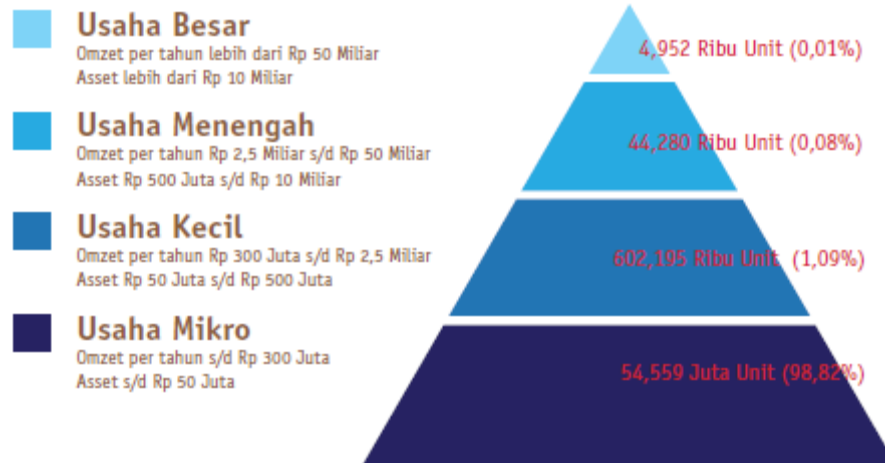
Mengacu pada tahun 2008 misalnya,, kontribusi UMKM terhadap penciptaan devisa nasional melalui ekspor non migas mengalami peningkatan sebesar Rp. 40,75 triliun atau 28,49% yaitu dengan tercapainya angka sebesar Rp. 183,76 triliun atau 20,17% dari total nilai ekspor non migas nasional. Selanjutnya pada tahun 2008, kontribusi UMKM terhadap total PDB nasional adalah sebesar Rp. 1.165,26 triliun atau 58,33%. Kemudian pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.270 orang atau 97,04% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada. Jumlah ini meningkat sebesar 2,43% atau 2.156.526 orang dibandingkan tahun 2007. (BPS : 2008)

UMKM masih akan menjadi primadona bagi pengembangan ekonomi daerah di masa mendatang. Banyak program yang telah dijalankan untuk memberdayakan UMKM sejak hampir 10 tahun yang lalu, namun hasilnya sampai saat ini belum menggembirakan. Sehingga perlu dicarikan model baru yang berbeda dengan yang sebelumnya agar UMKM tidak jalan di tempat. Dibutuhkan usaha-usaha strategik guna memberdayakan UMKM agar dapat menjadi penopang perekonomian lokal seperti yang terjadi di Jepang dan Taiwan. Oleh karena itu upaya mengembangkan dan memberdayakan UMKM agar hasil yang diperoleh memiliki *multiplier effect* yang tinggi menjadi sangat penting saat ini, khususnya dalam meningkatkan daya saing. Dengan daya saing itu diharapkan bisa meningkatkan pendapatan UMKM, tidak tergilas perdagangan bebas, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

Tabel 1.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar menurut UU No. 20 Tahun 2008



Tabel 2.

Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah, (UMKM) dan usaha besar (UB) tahun 2011 – 2012

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2011 ^{*)}		TAHUN 2012 ^{**)}		PERKEMBANGAN TAHUN 2011-2012	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	55,211,396		56,539,560		1,328,163	2.41
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	55,206,444	99.99	56,534,592	99.99	1,328,147	2.41
	- Usaha Mikro (UMi)	(Unit)	54,339,969	98.82	55,856,176	98.79	1,296,207	2.38
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	602,195	1.09	629,418	1.11	27,223	4.52
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	44,280	0.08	48,997	0.09	4,717	10.65
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	4,952	0.01	4,968	0.01	16	0.32
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	104,613,681		110,808,154		6,194,473	5.92
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	101,722,458	97.24	107,657,509	97.16	5,935,051	5.83
	- Usaha Mikro (UMi)	(Orang)	94,957,797	90.77	99,859,517	90.12	4,901,720	5.16
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	3,919,992	3.73	4,535,970	4.09	615,977	15.71
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	2,844,669	2.72	3,262,023	2.94	417,354	14.67
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	2,891,224	2.76	3,150,645	2.84	259,422	8.97
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	7,427,086.1		8,241,864.3		814,778.2	10.97
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	4,303,571.5	57.94	4,869,568.1	59.08	565,996.7	13.15
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	2,579,388.4	34.73	2,951,120.6	35.81	371,732.2	14.41
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	722,012.8	9.72	798,122.2	9.68	76,109.4	10.54
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	1,002,170.3	13.49	1,120,325.3	13.59	118,155.0	11.79
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	3,123,514.6	42.06	3,372,296.1	40.92	248,781.5	7.96

Keterangan :

*)Angka sangat sementara

**) Angka Prediksi

Produk UMKM dapat dijadikan andalan Indonesia dalam MEA 2015. Produk-produk UMKM Indonesia dapat dijadikan andalan dalam perdagangan internasional, diantaranya produk kerajinan, produk hasil pertanian dan produk lainnya. Jawa Tengah misalnya, sebagai salah satu provinsi yang terkenal kaya akan budaya mampu menghasilkan berbagai macam kerajinan yang kreatif. Diantaranya adalah lima produk unggulan meliputi tekstil, hasil pabrik, barang dari kulit, kayu dan anyaman serta barang dari batu. Kelima produk tersebut merupakan produk kerajinan yang mampu bersaing dalam dunia internasional. Selama tahun 2004-2008, tren ekspor non migas untuk lima produk unggulan menunjukkan tren yang positif bahkan cenderung meningkat.

Pada umumnya produk Usaha Kecil Menengah (UKM) mampu berkompetisi dengan produk internasional. Hal inilah yang dapat dijadikan peluang bagi produsen untuk bisa meningkatkan produktivitasnya dan berdaya saing tinggi. Dengan adanya persaingan bebas di region ASEAN atau disebut juga Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bukan lagi menjadi hal yang menakutkan bagi Indonesia. Karena pada dasarnya, setiap negara memiliki keunggulan yang mampu dijadikan *benchmark* negara tersebut. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarifuddin Hasan menyebutkan beberapa UKM yang cukup unggul antara lain bergerak di bidang furniture dan handicraft. UKM tersebut, kata dia, perlu didukung dari sisi permodalan. Dalam jangka panjang, adanya MEA juga menjadikan konsumen lebih jeli dalam memilih produk. Pada gilirannya bahwa produk yang kreatif, inovatif dan berkualitaslah yang mampu bertahan di tengah perdagangan bebas. Bagi produsen Indonesia, adanya MEA memberikan pelajaran akan pentingnya kualitas yang akan meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, disamping meminimalisir praktek monopoli.

Oleh karena itu, perlu kebijakan yang nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan produknya dengan daya saing tinggi dengan jalan merevitalisasi UMKM, diantaranya :

Infrastruktur

Pemerintah harus membangun infrastruktur dan memperbaiki infrastruktur yang telah ada agar biaya produksi bisa lebih efisien. Pembangunan jalan, pasokan listrik, gas dan BBM merupakan infrastruktur utama yang selama ini menjadi hambatan bagi kalangan pengusaha dalam menjalankan usahanya. Pemerintah bisa menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk memban-

gun infrastruktur tersebut.

Perizinan

Selama ini, kalangan investor banyak yang mengeluh terkait perizinan pendirian usaha yang memakan waktu lama. Bukan hanya itu, tumpang tindih kebijakan juga menghambat iklim investasi bagi investor. Disamping itu, pemerintah juga harus berani menindak dengan tegas praktek pungutan liar yang telah merajalela. Adanya pungutan liar tentu akan meningkatkan biaya produksi yang dapat meningkatkan harga jual suatu produk. Pada akhirnya, produk Indonesia menurunkan daya saing produk lokal. Oleh karena itu, perlu adanya sinergisitas kebijakan dan penerapan perizinan satu pintu secara maksimal serta meminimalisir praktek pungutan liar.

Akses Biaya dan Permodalan

Pemerintah berkomitmen membuka akses pembiayaan dan permodalan untuk para wirausaha baru. Akses biaya ini diperoleh dari sektor formal dan informal. Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Tamim Saefudin, mengatakan bahwa melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pemerintah menyediakan 20 ribu sertifikat tanah untuk digunakan sebagai agunan. Segala persyaratan dibuat menjadi lebih sederhana.

Kontrol Produk Asing

Salah satu dampak dari perdagangan bebas adalah menjamurnya produk asing. Pemerintah perlu mengontrol segala produk asing yang akan masuk ke Indonesia. Kebijakan yang bisa diberlakukan adalah melalui penerapan label SNI (Standar Nasional Indonesia). Produk lokal pun bisa bersaing dengan sehat karena kualitas tetap terjaga. Hal ini sangatlah penting mengingat banyak ditemukan produk asing dengan kualitas sangat rendah. Oleh karena itu pemerintah perlu mengontrol secara ketat produk asing supaya konsumen domestik tidak dirugikan dengan pemberlakuan MEA.

Pelatihan

Peningkatan SDM merupakan hal yang paling vital bagi Indonesia. Pelatihan bertujuan meningkatkan keahlian dan keterampilan para pelaku UMKM. Pelatihan tersebut dapat berbentuk sosialisasi.

Cinta Produk Dalam Negeri

Adanya perdagangan bebas seharusnya bisa diasiasi dengan penanaman cinta produk dalam negeri sejak dini. Selama ini, prinsip ekonomi secara efisien lebih banyak digemborkan daripada mencintai produk dalam negeri. Oleh karena itu, selain ekonomi berbasis ramah lingkungan, perlu adanya ekonomi berwawasan na-

sionalisme. Hal ini penting untuk bisa meningkatkan daya saing produk lokal di tengah serbuan produk asing. Jika sejak dini ditanamkan cinta produk dalam negeri, dalam jangka panjang diharapkan konsumen Indonesia bisa lebih memilih produk lokal karena akan memberikan kemanfaatan bagi perekonomiannya. Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap UMKM adalah perlunya aturan kuota minimal produk koperasi dan UMKM yang wajib dijual di satu toko modern. Dalam satu toko swalayan misalnya harus menjual minimal 10 produk UKM dengan jenis tertentu, khususnya yang diproduksi dengan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Selain itu, Produk UMKM juga seoptimal mungkin harus dilegalkan melalui pemberian label SNI yaitu bertujuan agar produk UMKM dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri.

SIMPULAN

Negara Indonesia sebagai Negara yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM dapat melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Mengingat MEA adalah sebuah pasar tunggal yang sangat spekulasi dalam perekonomian skala Internasional, Indonesia telah memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan produk-produk UMKM yang berorientasi pada ekspor. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak dari UMKM Indonesia yang tidak berbadan hukum. Hal inilah yang mengakibatkan kewaspadaan akan lenyapnya UMKM dalam negeri yang tidak memiliki label SNI. Peran pemerintah disini seharusnya merevitalisasi UMKM dengan beberapa cara, diantaranya adalah memperbaiki infrastruktur, perizinan, akses biaya dan permodalan, kontrol produk asing, pelatihan SDM, dan menanamkan cinta produk dalam negeri. Sehingga dengan demikian, UMKM Indonesia telah siap menghadapi pasar tunggal MEA 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Tabel Statistik Ekspo - Impor Indonesia, 2009. di unduh dari Badan Pusat Statistik.
- Tabel Statistik perkembangan UMKM dan UB Indonesia, 2009. di unduh dari Departemen koperasi dan UKM.
- Bank Indonesia, 2009. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.
- Statistik Neraca Perdagangan Indonesia, 2009. di unduh dari Departemen Perdagangan.
- Wafa, Agus Khirul. Mewujudkan UMK Kompetitif Menghadapi CAFTA. Dalam Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 13 Januari 2010.
- Tambunan, T.T.H., (2000), Development of Small-Scale Industries During the New Order Gov-

ernment in Indonesia, London: Ashgate.

Tambunan, T.T.H., (2008), "Masalah Pengembangan UMKM di Indonesia: Sebuah Upaya Mencari Jalan Alternatif", Makalah, yang di unduh dari <http://www.kadin-indonesia.or.id> pada tanggal 17 April 2013

www.depkop.go.id di akses pada tanggal 17 April 2013 pukul 12.50

www.bps.go.id di akses pada tanggal 17 April 2013 pukul 12.50

